BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia. Tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, kemiskinan juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Maulana et al., 2025). Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan memerlukan strategi yang komprehensif, berkelanjutan, dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kompleksitas masalah kemiskinan membutuhkan upaya pencegahan yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan berbagai permasalahan sosial yang saling berhubungan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pengelolaan program yang dilakukan secara tepat dan terintegrasi. Dalam perspektif manajemen program, upaya tersebut dapat dilihat melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan program secara efektif (Pratiwi & Rustianingsih, 2024).

Di Indonesia, yang dianggap sebagai negara berkembang, masalah kemiskinan menjadi perhatian utama karena banyak orang masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka (Purwanto et al., 2013). Kebutuhan dasar ini tidak hanya terbatas pada sandang, pangan, dan papan. Mereka juga mencakup akses ke pendidikan yang baik, perawatan medis yang baik, dan kesempatan ekonomil yang adil. Kondisi ini menunjukan bahwa kemiskinan lebih dari sekadar

kekurangan pendapatan itu adalah masalah yang lebih kompleks yang dipengaruhi. oleh elemen struktural, budaya, sosial, dan kebijakan publik. Untuk menangani kompleksitas ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Ini mencakup meningkatkan kemampuan masyarakat, memperkuat institusi sosial, dan membuat kebijakan yang lebih adil dan memperhatikan kelompok rentan (Elk dkk., 2020).

Jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2019 sebesar 24,79 juta jiwa, naik signifikan menjadi 27,55 juta jiwa pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19, tetapi setelah pandemi, Indonesia telah pulih. Penduduk miskin mencapai 26,50 juta pada tahun 2021, turun menjadi 26,36 juta pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 mencapai terendahnya, 25,90 juta (Badan Pusat Statistik, 2024).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan melalui kebijakan dan program yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan hidup. Salah satu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Makasenda et al., 2019). Berdasarkan Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mengembangkan strategi dan program untuk mengatasi kemiskinan. Empat strategi utama yang ditetapkan untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: 1) memperbaiki program perlindungan sosial; 2) meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pertanian dan peternakan; dan 3) meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan publik lainnya.

Kota Bekasi sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek merupakan wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang cukup tinggi. Namun demikian, pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, meskipun masih terdapat sejumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (Ristiani et al., 2023)

Beberapa penelitian menunjukan bahwa kemiskinan masih merupakan masalah strategis yang perlu ditangani secara serius, meskipun Kota Bekasi termasuk salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan relatif lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah lain di Jawa Barat (Noviansah, 2025). Hal ini disebabkan oleh ketimpangan sosial ekonomi, tingginya biaya hidup di kota-kota, dan peningkatan populasi akibat urbanisasi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.



Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Bekasi

Sumber: (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi 2025)

Berdasarkan Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode 2016–2024 mengalami fluktuasi, dengan tren penurunan dari 140,03 ribu jiwa (5,06%) pada tahun 2016 menjadi titik terendah 113,65 ribu jiwa (3,81%) pada tahun 2019, kemudian meningkat kembali pada 2020–2021 hingga mencapai 144,1 ribu jiwa (4,74%) yang diduga dipengaruhi oleh tekanan ekonomi seperti pandemi, sebelum kembali menurun secara bertahap hingga 128,84 ribu jiwa (4,01%) pada tahun 2024. Namun demikian, kondisi kemiskinan belum sepenuhnya membaik karena Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat sebesar 0,80 (naik 0,17) yang menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih cukup jauh di bawah garis kemiskinan, serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,21 (naik 0,08) yang mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin masih terjadi, sementara itu garis kemiskinan sebesar Rp842.927 per kapita per bulan yang meningkat 5,98% mencerminkan naiknya standar kebutuhan minimum, sehingga secara keseluruhan meskipun persentase kemiskinan cenderung menurun, tingkat kedalaman dan

keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa kesejahteraan kelompok miskin masih memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih optimal.

Di sisi lain, faktor-faktor seperti tingkat pengangguran, kualitas sumber daya manusia, serta akses terhadap layanan publik juga turut mempengaruhi kondisi kemiskinan di Kota Bekasi. Studi empiris menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki korelasi dengan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan, termasuk Bekasi (Anwari & Ambariyanto, 2024). Ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Bekasi kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai elemen struktural.

Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan secara integritas. Peraturan daerah ini menekankan betapa pentingnya bekerja sama dengan program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar. Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah Kota Bekasi telah mengintegrasikan program bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan, dan program pemberdayaan masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial berupa bantuan tunai, pendidikan, dan kesehatan yang ditujukan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), khususnya keluarga yang memiliki anak usia 0–15 tahun dan ibu hamil atau nifas. Program ini merupakan salah satu kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan

(Wulandari & Muljono, 2018). PKH diberikan secara bersyarat, sehingga penerima manfaat diwajibkan memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaan PKH diarahkan tidak hanya untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung upaya pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu instrumen kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Secara konstitusional, program ini berpijak pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Implementasi amanat konstitusional tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, serta Perpres no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi payung hukum bagi seluruh program perlindungan sosial di Indonesia termasuk PKH.

PKH lebih berfokus pada upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial untuk rumah tangga miskin daripada melanjutkan program bantuan sebelumnya, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang diberikan untuk membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli mereka saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM (Hidayat, 2018).

Di sisi lain, kemiskinan dan program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Bekasi timur menjadi perhatian penting pemerintah dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Bekasi Timur yang memiliki jumlah penduduk sekitar 259.270 jiwa masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang berkisaran 4–5% dari total penduduk, dengan perkiraan jumlah masyarakat miskin mencapai sekitar 10.000 hingga 13.000 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga memerlukan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Sementara Kelurahan Margahayu merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, Kelurahan Margahayu memiliki jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 26 RW dan 166 Rukun Tetangga (RT), yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki struktur masyarakat yang cukup luas dan kompleks.

Di Kecamatan Bekasi Timur, Kelurahan Margahayu merupakan salah satu wilayah yang memiliki permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya terkait dengan kemiskinan. Berdasarkan Rekap Basis Data Terpadu (BDT) Januari 2019 yang dikutip dalam penelitian Chotim & Jannah (2021) jumlah penduduk miskin di Kelurahan Margahayu tercatat sebanyak 3.519 kepala rumah tangga (KRT) atau 12.978 jiwa. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi dibandingkan kelurahan lainnya di Kecamatan Bekasi Timur pada periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terutama melalui program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Margahayu mulai dilaksanakan pada tahun 2012. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah permasalahan, terutama terkait ketepatan sasaran penerima bantuan, pemutakhiran data, serta pemahaman dan kepatuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap ketentuan program. Selain itu, terdapat penerima bantuan yang kondisi sosial ekonominya telah mengalami perubahan, tetapi belum diperbarui dalam data penerima. Kondisi ini menunjukkan pentingnya proses verifikasi dan validasi data secara berkala agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan, sehingga tujuan PKH dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Kelurahan Margahayu dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan observasi lapangan terdapat permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sosialisasi peraturan daerah nomor 14 tahun 2024 tentang kesejateraan sosial. Hal ini diperkuat oleh Bapak Heri Sunandar S.AP., M.Si di Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Pada tanggal 26 Mei 2026 di Dinas Sosial Kota Bekasi) yang mengatakan bahwa:

   > "Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui isi dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Sosial. Selama ini sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, terutama kelompok masyarakat kurang mampu atau desil 1. Akibatnya, masih terdapat warga yang belum memahami hak, kewajiban, serta berbagai program kesejahteraaan sosial yang disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk Program Keluarga Harapan itu sendiri".

2. Belum Optimalnya Evaluasi dan Monitoring terkait dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini diperkuat Ibu Wiwik Rahayu selaku

Ketua Tim PKH (pada tanggal 26 Mei 2026, di Dinas Sosial Kota Bekasi) sebagai berikut:

> "Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program PKH masih menghadapi beberapa kendala. Diantaranya, banyaknya jumlah penerima manfaat yang harus dipantau serta keterbatasan petugas yang melakukan pengawasan di lapangan. Selain itu, proses pembaruan data penerima bantuan juga belum selalu dilakukan secara cepat dan tepat. Nah kondisi tersebut yang menyebabkan pelaksanaan program belum dapat dipantau secara maksimal sehingga masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penyalurannya".

3. Belum Tepat sasaran Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini diperkuat Ibu Wiwik Rahayu selaku Ketua Tim PKH (pada tanggal 26 Mei 2026 di Dinas Sosial Kota Bekasi) sebagai berikut:

> "Masih ditemukan adanya masyarakat yang kondisi ekonominya sudah cukup baik tetapi masih menerima bantuan PKH. Di sisi lain, terdapat warga yang tergolong kurang mampu dan layak menerima bantuan justru belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Permasalahan ini diduga terjadi karena data penerima bantuan belum sepenuhnya diperbarui sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Akibatnya, bantuan yang diberikan belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum daoat tercapai secara optimal".

Berdasarkan uraian tersebut, Perda No. 14 Tahun 2024 menunjukan belum maksimalnya sosialisasi Program Keluarga Harapan, belum optimal evaluasi dan monitoring pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan belum tepat sasaran Program Keluarga Harapan, maka diperlukan penelitian mengenai strategi Pemerintah pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi melalui Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya dalam menganalisis implementasi program, hambatan yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam mendukung kebijakan daerah, dengan

judul: **Strategi Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margahayu kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam Mengentaskan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi?
3. Upaya apakah yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Beberapa penelitian mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) telah banyak dilakukan sebelumnya, baik yang mengkaji implementasi, efektivitas, maupun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas strategi pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikaitkan dengan kebijakan daerah, khususnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada dampak program, tetapi lebih menitikberatkan pada bagaimana strategi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi PKH sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam mengkaji kebijakan dan strategi tersebut, penelitian ini memerlukan berbagai referensi yang relevan, baik berupa jurnal ilmiah, skripsi, maupun buku yang berkaitan dengan strategi kebijakan publik, kemiskinan, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Maria Frederika Takndare, Ferly Agustina Sairmaly, dan Paulus Laratmase (2025)	Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Arui Das	Kualitatif	Pelaksanaan PKH didukung oleh pendamping desa dan petugas PKH melalui sosialisasi, verifikasi data, monitoring, koordinasi, serta pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan. PKH dinilai membantu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan serta menurunkan kemiskinan. Hambatan yang ditemukan berupa ketergantungan masyarakat terhadap bantuan, keterlambatan pencairan dana, keterbatasan sumber daya manusia, dan kondisi geografis.
2	Slamet Agus Purwanto, Sumartono, dan M. Makmur (2013). (Purwanto dkk., 2013)	Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)	Kualitatif	Pelaksanaan PKH berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi anak. Keberhasilan program didukung oleh sosialisasi, monitoring, kerja sama pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi pelaksana yang berjalan dengan baik.

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Nisfiatil Mubarokah (2023)	Strategi Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kebumen Baturraden Banyumas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif	Strategi PKH dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat, pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pembinaan usaha, penyaluran bantuan, kegiatan simpan pinjam, dan evaluasi. Strategi tersebut dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota
4	Alan Hidayat (2018)	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu	Kualitatif	Pelaksanaan PKH di Kelurahan Margahayu berjalan efektif. Keberhasilan program terlihat dari pemahaman KPM, ketepatan sasaran berdasarkan data yang valid, penyaluran bantuan yang terstruktur, serta peran aktif pendamping sosial dalam pelaksanaan program
5	Debby Intan Suci Rahmawati, Eka Yulyana, dan Rahman (2022). (Rahmawati, D. I. S dkk., 2022)	Manajemen Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang	Kualitatif	Manajemen strategi Dinas Sosial belum berjalan optimal. Permasalahan terdapat pada formulasi strategi yang belum berorientasi jangka panjang, implementasi program yang belum

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				merata, serta evaluasi yang belum disertai langkah korektif terhadap permasalahan yang ditemukan.
6	Muklas Adi Putra dan Titi Darmi (2024). (Adi Putra & Darmi, 2024)	Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan	Kualitatif	Dinas Sosial telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, edukator, perwakilan, dan pelaksana teknis dalam penanggulangan kemiskinan. Peran tersebut memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7	Dedy Utomo, Abdul Hakim, dan Heru Ribawanto (2014). (Utomo dkk., t.t.)	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)	Kualitatif	PKH berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan didukung oleh partisipasi masyarakat, perangkat desa, guru, bidan desa, dan pendamping sosial. Namun, masih ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman peserta dan ketidakakuratan data penerima manfaat.
8	Putu Dion Wahyu Pratama dan I Nyoman Mudarya (2021).	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Upaya Pengentasan	Kualitatif	Pelaksanaan PKH berjalan cukup baik dan mampu mencapai tujuan dalam mengurangi

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(Pratama & Mudarya, 2021)	Kemiskinan di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng		kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pendamping, pencairan bantuan, ketidakakuratan data penerima, serta ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan.
9	Cahyo Sasmito dan Ertien Rining Nawangsari (2019). (Sasmito & Nawangsari, 2019)	Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu	Kualitatif	Implementasi PKH berjalan cukup baik. Keberhasilan didukung oleh komunikasi antara Dinas Sosial, pendamping PKH, dan peserta program serta ketersediaan sumber daya. Pendamping berperan aktif dalam membantu peserta memenuhi persyaratan program dan mengembangkan keterampilan.
10	Shella Yulia Rosalina (2018). (Rosalina, 2018)	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	Kualitatif	PKH cukup berhasil membantu pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pelaksanaan program dilakukan melalui penetapan sasaran, validasi data, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok peserta, verifikasi komitmen, pemutakhiran data, dan

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				penanganan pengaduan.

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu yang terdapat dalam tabel 1.1 tersebut, penelitian ini memiliki letak perbedaan dan kebaruan (*state of the art*) sebagai berikut:

1. Penelitian ini secara khusus mengkaji strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang sebagian besar berfokus pada implementasi, efektivitas, evaluasi, maupun dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat, penelitian ini menitikberatkan pada strategi pemerintah dalam menjalankan PKH sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Fokus tersebut mencakup bagaimana pemerintah merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi PKH di tingkat lokal.
2. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan teori strategi Fred R. David untuk menganalisis pelaksanaan PKH. Penelitian ini menganalisis strategi pemerintah melalui tiga tahapan, yaitu Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi Strategi. Ketiga tahapan tersebut digunakan untuk melihat proses pendataan dan penentuan sasaran penerima, pelaksanaan dan pendampingan KPM, penyaluran serta pengawasan bantuan, hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan KPM.
3. Penelitian ini memiliki perbedaan pada lokasi dan konteks penelitian, yaitu secara spesifik dilakukan di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur

Kota Bekasi. Meskipun terdapat penelitian terdahulu yang juga mengkaji PKH di Kelurahan Margahayu, penelitian tersebut berfokus pada efektivitas pelaksanaan PKH, sedangkan penelitian ini mengkaji strategi pemerintah dengan melihat keseluruhan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap pelaksanaan PKH pada lokasi yang sama.

4. Penelitian ini tidak hanya melihat pelaksanaan dan hasil program, tetapi juga mengidentifikasi hambatan serta upaya pemerintah dalam menjalankan strategi pengentasan kemiskinan melalui PKH. Hambatan yang dikaji antara lain berkaitan dengan ketepatan dan pemutakhiran data penerima, perubahan kondisi sosial ekonomi KPM, mekanisme penyaluran bantuan, koordinasi antar pihak, serta monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, penelitian ini melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi hambatan tersebut.
5. Perbedaan penelitian juga terdapat pada subjek dan sumber informasi yang digunakan. Penelitian ini melibatkan pihak yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan PKH, yaitu Dinas Sosial Kota Bekasi, Kelurahan Margahayu bidang Kesejahteraan Sosial, Kecamatan Bekasi Timur bidang Kesejahteraan Sosial, Pendamping PKH Kelurahan Margahayu, serta masyarakat penerima manfaat (KPM). Penggunaan berbagai sumber tersebut memungkinkan penelitian memperoleh gambaran dari sisi pemerintah, pelaksana program, dan penerima manfaat.
6. Dari aspek metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi

untuk memperoleh gambaran mengenai strategi pemerintah dalam pelaksanaan PKH. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami kondisi empiris, pengalaman informan, proses pelaksanaan program, hambatan, serta upaya yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Margahayu.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bekasi. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Kota Bekasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, khususnya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan dalam implementasi program sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Bagi pendamping PKH, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pendampingan, koordinasi, serta pembinaan kepada keluarga penerima manfaat agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Selain itu, bagi masyarakat penerima manfaat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan bantuan sosial secara tepat untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan kajian dalam pengembangan penelitian mengenai kebijakan publik, kesejahteraan sosial,

dan strategi pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial di tingkat daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Sistematika penulisan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : Menguraikan latar belakang penelitian mengenai strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pembahasan diawali dengan permasalahan kemiskinan, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, serta pelaksanaan PKH sebagai salah satu program perlindungan sosial. Bab ini juga menjelaskan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan PKH, meliputi belum optimalnya sosialisasi kebijakan kesejahteraan sosial, monitoring dan evaluasi yang belum maksimal, serta ketepatan sasaran penerima bantuan. Selain itu, Bab I memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang mencakup aspek akademik dan praktis, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum mengenai susunan pembahasan penelitian.

BAB II : Membahas landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui PKH. Kajian teori meliputi konsep strategi, konsep kemiskinan, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Penelitian ini menggunakan teori strategi Fred R. David yang mencakup tiga tahapan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Selain itu, bab ini menyajikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kebaruan penelitian, serta kerangka pemikiran, definisi operasional, dan asumsi penelitian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan analisis.

BAB III : Menjelaskan pendekatan dan tahapan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data mengenai strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui PKH di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pembahasan dalam bab ini mencakup paradigma penelitian, metode dan desain penelitian, sumber serta teknik perolehan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data, serta pengujian keabsahan data melalui aspek trustworthiness dan otensitas. Bab ini juga menjelaskan data informan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian sebagai dasar untuk memahami proses pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Menyajikan gambaran umum objek penelitian dan hasil analisis mengenai strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan

melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pembahasan diawali dengan kondisi geografis dan demografis Kota Bekasi, dilanjutkan dengan profil Dinas Sosial Kota Bekasi yang meliputi kantor, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsinya. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis berdasarkan tiga tahapan strategi Fred R. David, yaitu perumusan strategi yang mencakup pemetaan dan penentuan sasaran serta sosialisasi dan pendampingan; implementasi strategi yang meliputi penetapan sasaran operasional, penerapan petunjuk teknis dan SOP, penyaluran bantuan, serta koordinasi dan pengawasan; dan evaluasi strategi yang mencakup monitoring, evaluasi, serta pelaporan perkembangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bab ini juga menguraikan berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH, seperti ketidakakuratan dan keterlambatan pemutakhiran data, ketidaksesuaian NIK, perpindahan domisili penerima manfaat, kendala penyaluran bantuan, dan koordinasi antarinstansi. Selain itu, dibahas upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut melalui verifikasi dan pemutakhiran data, peningkatan koordinasi, pendampingan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), serta pemberdayaan dan penguatan kemandirian ekonomi KPM.

BAB V : Merupakan bagian akhir penelitian yang memuat simpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab

sebelumnya. Simpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah mengenai strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui PKH, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sementara itu, rekomendasi berisi saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Sosial Kota Bekasi, pemerintah kecamatan dan kelurahan, pendamping PKH, serta pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan program. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, kualitas pemutakhiran data, efektivitas monitoring dan evaluasi, koordinasi antarinstansi, serta pemberdayaan KPM agar semakin mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial secara berkelanjutan.